ANALISIS DETERMINAN KORUPSI ERA REFORMASI DI INDONESIA TAHUN 1999-2022 DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI

Muhammad Yusuf Mulhan Nurhaqqi* dan Nugroho SBM

Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

*Corresponding Email: yusufm@students.undip.ac.id

ABSTRACT

Corruption is one of the serious issues that hinder economic growth and the equitable distribution of welfare in Indonesia. This study aims to analyze the impact of economic growth, tax revenue, the Human Development Index (HDI), and poverty on the Corruption Perceptions Index (CPI) in Indonesia from 1999 to 2022. This research employs a quantitative approach using secondary time-series data from 1999 to 2022, obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and Transparency International. The analytical method used in this study is multiple linear regression analysis with the Ordinary Least Squares (OLS) method. The results indicate that economic growth has a positive and significant effect on the CPI. Tax revenue and poverty have a negative and significant effect on the CPI. Meanwhile, the Human Development Index does not have a significant effect on the CPI.

Keywords: Corruption, Economic growth, Tax revenue, Human Development Index, Poverty

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia karena secara komprehensif berdampak pada seluruh aspek khususnya kerugian finansial (Uroos *et al*., 2022). Korupsi menurut Aidt (2003) secara teoritis didefinisikan sebagai penyalahgunaan aset untuk kepentingan pribadi dan bertindak sebagai kewajiban atas modal. Studi yang dilakukan oleh Elbahnasawy dan Revier (2012) menyatakan bahwa korupsi dapat mengurangi produktivitas pengeluaran publik, mendistorsi alokasi sumber daya, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Indonesia berdasarkan publikasi *Transparency International* (2022) memiliki skor indeks persepsi korupsi sebesar 34 dan berapa pada peringkat 110 dari 180 negara. Indeks persepsi korupsi di Indonesia sejak era reformasi pada

kurun tahun 1999-2019 mengalami tren peningkatan, namun pada tahun 2019-2022 mengalami tren penurunan. Ranking indeks persepsi korupsi di Indonesia pada tahap awal era reformasi tahun 1999-2007 terus mengalami kemunduran dari 96 menjadi 143 hingga pada tahun 2022 mulai membaik berada pada rangking 110.

Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam sistem politik dan pemerintahan sejak bergulirnya era reformasi pada tahun 1998. Reformasi membawa demokratisasi serta desentralisasi kekuasaan dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, korupsi dalam perkembangannya justru semakin tersebar luas di berbagai sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah **(**Aspinall & Van Klinken, 2011**).** Desentralisasi yang diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan justru membuka celah baru bagi korupsi, khususnya di tingkat pemerintahan daerah **(**Fisman & Gatti, 2002**).**

Berdasarkan KPK (2023), jumlah kasus korupsi di Indonesia selama tahun 2000–2022 mengalami peningkatan pasca dibentuknya komisi pemberantasan korupsi (KPK) di Indonesia pada tahun 2004. Rincian tindak pidana korupsi di Indonesia yang berhasil ditangani KPK berdasarkan jenis perkaranya sepanjang 2004-2022 adalah gratifikasi/penyuapan sebesar 904 kasus, pengadaan barang/jasa sebanyak 277 kasus, penyalahgunaan anggaran sebanyak 57 kasus, TPPU sebanyak 50 kasus, pungutan/pemerasan sebanyak 27 kasus, perizinan sebanyak 25 kasus, dan merintangi proses KPK sebanyak 11 kasus. Mayoritas tindak pidana korupsi dilakukan di instansi pemerintah kabupaten/kota yakni sebanyak 548 kasus sepanjang diikuti oleh instansi kementerian dan pemerintah provinsi.

Korupsi dalam model pertumbuhan ekonomi neo-klasik diidentifikasi sebagai akibat dari ketidakefisienan pemerintah yang memiliki monopoli alami atas penyediaan barang publik. Elbahnasawy dan Revier (2012) menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan korupsi diantaranya karakteristik ekonomi, sosio-kultural, dan politik.

Karakteristik ekonomi yang dimaksud salah satunya terkait dengan tahapan perkembangan ekonomi sebagaimana ditunjukkan oleh laju PDB (pertumbuhan ekonomi) (Treisman, 2000). Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator makroekonomi tampaknya memberikan pengaruh signifikan terhadap korupsi (Myrdal, 1968). Negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menekan korupsi karena sumber daya yang melimpah sehingga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka kemungkinan kasus korupsi lebih kecil.

Fismann dan Gatti (2002) mengungkapkan bahwa penerimaan negara khususnya sektor pajak sebagai indikator ekonomi turut mempengaruhi tingkat korupsi negara. Pengelolaan pajak yang efisien mampu menurunkan korupsi namun ketika tidak dikelola secara efisien justu menimbulkan pola-pola monopoli aktivitas di sektor publik sehingga memperparah korupsi (Bertinelli *et al*., 2020)

Kualitas manusia dalam hal ini pada akhirnya sangat mempengaruhi budaya dan persepsi terkait korupsi. Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan parameter pengukur kualitas hidup manusia. Verawaty (2019) menyatakan bahwa kualitas manusia mempengaruhi produktivitas sehingga peningkatan kualitas manusia seharusnya berdampak pada berkurangnya perilaku korupsi.

Permasalahan ekonomi fundamental yang sangat berhubungan dengan korupsi adalah kemiskinan. Fenomena kemiskinan secara holistik pada dasarnya tidak hanya berhubungan dengan rendahnya kapasitas finansial, namun secara komprehensif menyangkut deprivasi pada berbagai akses sehingga dampaknya luas terhadap masalah lainnya seperti korupsi (Franciari dan Sugiyanto, 2012). Premis tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kemiskinan pada akhirnya menyebabkan maraknya kasus korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak, indeks pembangunan manusia, dan kemiskinan terhadap *Corruption Perceptions Index (CPI)* di Indonesia tahun 1999 – 2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi dalam Kerangka Berpikir Ekonomi Neo-Klasik

Korupsi dalam perspektif ekonomi dimodelkan melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi neo-klasik terkait efisiensi. Pemerintahan yang melakukan korupsi dimodelkan dengan situasi di mana pejabat menggunakan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang publik (Baretto, 2000). Teori ini disajikan dalam kurva seperti gambar berikut.

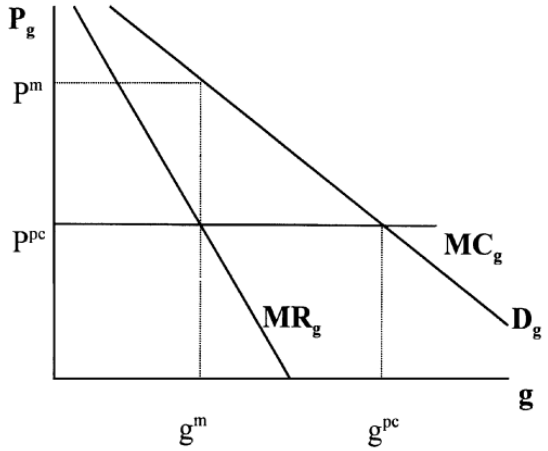

Gambar 1. Kurva Permintaan Barang Publik
Sumber: Shleifer dan Vishny (1993)

Gambar 1 menunjukkan model permintaan barang publik (g) dimana MR merupakan pendapatan marginal dan MCg adalah biaya marginal pemerintah. MCg bisa jadi bukan merupakan biaya produksi yang sebenarnya artinya pejabat korup menjual barang publik berbeda dengan nilai sebenarnya. Pejabat yang melakukan tindakan korup mungkin sangat menyadari nilai riil barang publik tersebut, namun memiliki "daya dukung" kelembagaan sehigga dapat melalukan tindakan tersebut dengan baik. Oleh karena itu, biaya marginal untuk menyediakan (g) akan menjadi fungsi dari kemungkinan korupsi.

Kasus yang diestimasi dalam model dikategorikan menjadi tiga. Pertama, jika tidak ada kasus korupsi harga barang publik (g) adalah P^{pc} = MCg dengan kuantitas yang disediakan adalah g^{pc}. Kedua, jika ada kasus korupsi diasumsikan barang publik disediakan seolah-olah berada pada pasar persaingan sempurna dan jika pejabat pemerintah diberdayakan untuk menjual barang publik (korupsi) dia secara optimal akan memilih untuk membebankan premi barang tersebut sehingga harga barang publik tersebut adalah P^m/MRg = MCg > P^{pc} sehingga jumlah barang publik nilainya $g^m < g^{pc}$ (pasar monopolistik).

Kemungkinan ketiga adalah agen pemerintah bisa menyediakan barang publik yang dicuri tanpa biaya untuk dirinya sendiri, dengan kata lain tanpa mempengaruhi biaya produksi. Biaya marginal barang publik untuk koruptor adalah nol dimana dalam keadaan seperti itu terjadi kasus MCg = 0 dengan harga yang dikenakan oleh agen adalah P<P^{pc} sehingga korupsi dapat meningkatkan efisiensi. Asumsi tersebut dapat terjadi misalkan ketika birokrasi terlibat dalam sektor publik menyebabkan harga g menjadi sangat tinggi sehingga agen dapat menebusnya dengan menjadi korup. Skema tersebut tampak pada gambar berikut ini.

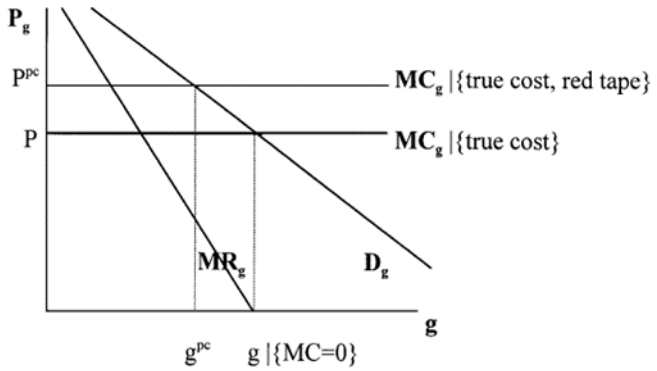

Gambar 2. Kurva Permintaan Barang Publik karena Korupsi
Sumber: Shleifer dan Vishny (1993)

Model Shleifer dan Vishny mengasumsikan bahwa biaya marginal yang ditunjukkan melalui grafik (MCg) seperti tertera pada gambar 2 merupakan kemungkinan biaya marginal penyediaan barang publik karena kasus korupsi. Konsumsi barang publik merupakan balas jasa atas faktor produksi berupa modal. Penyediaan barang publik dalam hal ini merupakan biaya marginal sosial yang terkait dengan alokasi modal antara sektor swasta dan publik. Pemerintah menerima suap bukan pada harga sebenarnya dari g. Suap dalam pandangan pengusaha merupakan sebagai biaya produksi yang harus dikorbankan untuk mengefisiensikan birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder meliputi *Corruption Perceptions Index*, pertumbuhan ekonomi, penerimaan sektor pajak, indeks pembangunan manusia, dan kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan *Transparency International.*

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data *time series* dengan periode 1999-2022. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Squares.* Model estimasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$CPIt = \beta_0 + \beta_1 PE_t + \beta_2 LnPSP_t + \beta_3 IPM_t + \beta_4 K_t + \varepsilon t \qquad (1)$$

Keterangan

CPI_t	: *Corruption Perceptions Index*
PE_t	: Pertumbuhan Ekonomi
PSP_t	: Penerimaan Pajak
IPM_t	: Indeks Pembangunan Manusia
K^t	: Kemiskinan
β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2 \beta_3, \beta_4$	: Koefisien regresi
ε_t	: Error

Uji stasioneritas dilakukan terlebih dahulu sebelum menganalisis data *time series.* Analisis yang menggunakan data *time series* mewajibkan datanya haruslah stasioner. Data dikatakan stasioner apabila rata-rata variansnya tidak terdapat variasi sepanjang waktu. Data yang tidak stasioner akan menyebabkan kesulitan dalam melakukan estimasi dan regresi menjadi tidak tepat *(spurious regression)* (Gujarati & Porter, 2012). Setelah uji stasioneritas kemudian dilakukan uji kointegrasi untuk mengetahui apakah data *time series* memiliki hubungan yang stabil dalam jangka panjang (Gujarati & Porter, 2012).

Deteksi asumsi klasik dilakukan untuk memastikan data yang dihasilkan terdistribusi normal dan model yang diestemasi menjadi valid untuk dilakukan penelitian atau BLUE (*Best Linear Unbiased Estimation)***.** Deteksi asumsi klasik meliputi deteksi normalitas, deteksi multikolinearitas, deteksi heteroskedastisitas, dan deteksi autokorelasi (Gujarati & Porter, 2012). Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan pengujian hipotesis pada model yang meliputi uji signifikansi parsial (uji t), uji signifikansi simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Stasioneritas

Pengujian stasioneritas pada data *time series* perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan estimasi. Penelitian ini menggunakan uji stasioneritas dengan metode *Augmented Dickey-Fuller* (ADF). Hasil uji stasioneritas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Stasioneritas

Variabel	Tingkat	Probabilitas	Keterangan
CPI	*Level*	0,0129	Stasioner
Pertumbuhan Ekonomi		0,0030	Stasioner
Penerimaan Pajak		0,0241	Stasioner
IPM		0,2988	Tidak Stasioner
Kemiskinan		0,0429	Stasioner
CPI	*First Difference*	0,0016	Stasioner
Pertumbuhan Ekonomi		0,0012	Stasioner
Penerimaan Pajak		0,0057	Stasioner
IPM		0,0024	Stasioner
Kemiskinan		0,0000	Stasioner

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel IPM tidak stasioner pada pengujian tingkat level. Oleh karena itu, pengujian stasioneritas dilakukan lagi pada tingkat *first difference*. Variabel CPI, pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak, IPM, dan kemiskinan pada tingkat *first difference* menunjukkan hasil stasioner karena nilai probabilitas yang kurang dari tingkat $\alpha = 5\%$.

Pengujian Kointegrasi

Uji kointegrasi merupakah langkah yang ditempuh setelah melakukan uji stasioner. Hal ini diperlukan ketika data time series tidak stasioner pada tingkat level. Uji kointegrasi pada penelitian ini menggunakan metode Johansen. Hasil uji kointegrasi disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Kointegrasi

Hypothesized No. of CE(s)	**Probabilitas**
None*	0,0001
At most 1*	0,0030
At most 2	0,1554
At most 3	0,1653
At most 4*	0,0233

Tabel 2 menunjukkan nilai probabilitas None kurang dari taraf signifikan 5% yang artinya variabel-variabel dalam penelitian terkointegrasi atau terdapat hubungan dalam jangka panjang.

Deteksi Asumsi Klasik

Deteksi asumsi klasik berguna untuk mengetahui apakah model regresi telah memenuhi kriteria *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).* Hasil deteksi asumsi klasik menunjukkan sudah terpenuhinya asumsi atas deteksi normalitas, deteksi multikolinearitas, deteksi heteroskedastisitas, dan deteksi autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Uji yang dilakukan meliputi uji signifikansi parsial (Uji t), uji signifikansi simultan (Uji F), dan koefisien determinasi (R^2). Hasil analisis adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Variabel Dependen: *Corruption Perceptions Index* (CPI)			
Variabel	Koefisien	t-Statistik	t-Tabel
C	-1.107290	-2.306900*	
PE	0.035962	2.478652*	
Ln(PSP)	-3.238176	-4.179472*	1.729
IPM	3.178651	1.237555	
K	-0.882059	-2.296525*	
R-Squared	0.972172		
F-statistic	165.9401		
Prob (F-statistic)	0.000000		
Obs.	24		

*signifikan pada $\alpha = 5\%$

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,972172. Hasil tersebut artinya kemampuan variabel pertumbuhan ekonomi, penerimaan sektor pajak, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kemiskinan mampu menerangkan variabel *Corruption Perceptions Index* (CPI) sebesar 97,21% sedangkan sisanya 2,79% dijelaskan oleh variabel lain di luar model estimasi. Kemudian diperoleh nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000000 maka variabel pertumbuhan ekonomi, penerimaan sektor pajak, IPM, dan kemiskinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap CPI.

Hasil uji signifikansi individu menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai t-hitung sebesar 2,478652, dimana lebih dari t-tabel (1,729) maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Artinya, variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap CPI. Kemudian, variabel penerimaan sektor pajak memiliki nilai t-hitung sebesar -4,179472, dimana lebih dari t-tabel (1,729) maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Artinya, variabel penerimaan sektor pajak secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CPI. Selanjutnya, variabel kemiskinan memiliki nilai t-hitung sebesar -2,296525, dimana lebih dari t-tabel (1,729) maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Artinya, variabel kemiskinan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CPI. Sementara, variabel IPM memiliki nilai t-hitung sebesar 1,237555, dimana kurang dari t-tabel (1,729) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya, variabel IPM secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap CPI.

Interpretasi Hasil

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap CPI

Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai t-hitung sebesar 2,478652, dimana lebih dari t-tabel (1,729). Artinya, pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap CPI. Kemudian, nilai koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar 0,035962 artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1 persen maka CPI akan meningkat sebesar 0,035962 persen dengan asumsi variabel lain tetap.

Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan CPI yang berarti bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi diikuti oleh turunnya tingkat korupsi. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan korupsi dengan memperbaiki efisiensi birokrasi dan mendorong reformasi kelembagaan. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan dan peluang untuk korupsi berkurang karena adanya peningkatan transparansi serta daya saing di sektor publik dan swasta.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Ata dan Arvas (2011) yang meneliti di 25 wilayah Eropa dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh dalam menurunkan tingkat korupsi.

Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap CPI

Variabel penerimaan sektor pajak memiliki nilai t-hitung sebesar -4,179472, dimana lebih dari t-tabel (1,729). Artinya, penerimaan sektor pajak secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CPI. Selanjutnya, nilai koefisien penerimaan sektor pajak sebesar -3,238176 artinya jika penerimaan sektor pajak meningkat sebesar 1 persen maka CPI akan menurun sebesar 3,238176 persen dengan asumsi variabel lain tetap.

Kenaikan penerimaan sektor pajak akan berpengaruh signifikan dalam menurunkan CPI yang berarti bahwa meningkatnya penerimaan sektor pajak diikuti oleh naiknya tingkat korupsi. Hal ini berarti semakin tinggi pajak yang dibayarkan maka akan semakin tinggi pula korupsinya. Penerimaan pajak yang meningkat akan meningkatkan korupsi karena dana yang lebih besar membuka peluang untuk penyalahgunaan dalam proyek pemerintah, penggelembungan anggaran, dan pengelolaan yang tidak transparan (Mauro, 1995).

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Friska dan Sasana (2013) yang menemukan bahwa pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap korupsi. Temuan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2013). Penelitian tersebut menemukan bahwa menurunnya penerimaan pajak dapat meningkatkan korupsi atau dengan kata lain meningkatnya penerimaan pajak akan mempengaruhi dalam menurunkan tingkat korupsi.

Perbedaan temuan tentang pengaruh penerimaan pajak terhadap korupsi sesuai dengan temuan Tyburski *et al*. (2020) yang menyatakan bahwa peningkatan

penerimaan pajak memiliki korelasi positif maupun negatif terhadap korupsi tergantung pengelolaan sistem perpajakan.

Pengaruh IPM terhadap CPI

Variabel IPM memiliki nilai t-hitung sebesar 1,237555, dimana kurang dari t-tabel (1,729). Artinya, IPM secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap CPI. Kemudian, nilai koefisien Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 3,178651 artinya jika IPM meningkat 1 persen maka CPI akan meningkat 3,178651 persen dengan asumsi variabel lain tetap. Akan tetapi, kenaikan IPM tidak diikuti dengan meningkatnya CPI secara signifikan.

IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi karena faktor-faktor institusional dan kebijakan pemerintahan memiliki dampak yang lebih besar dalam menurunkan tingkat korupsi dibandingkan dengan kualitas hidup yang tercermin dalam IPM (Campos *et al*, 2010).

Hasil penilitian ini sejalan dengan temuan Adriyanto (2016) yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap CPI.

Pengaruh Kemiskinan terhadap CPI

Variabel kemiskinan memiliki nilai t-hitung sebesar -2,296525, dimana lebih dari t-tabel (1,729). Artinya, kemiskinan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CPI. Selanjutnya, nilai koefisien kemiskinan sebesar -0,882059 artinya jika kemiskinan meningkat 1 persen maka CPI akan menurun 0,882059 persen dengan asumsi variabel lain tetap.

Kemiskinan yang meningkat akan berpengaruh signifikan dalam menurunkan CPI yang berarti bahwa semakin parah kemiskinan maka korupsi juga tambah merajalela. Tindakan suap dan praktik korupsi oleh pejabat publik lebih mungkin terjadi pada masyarakat yang lebih miskin (Justesen dan Bjornskov, 2014). Individu dengan pendapatan rendah lebih cenderung dipaksa membayar suap dibandingkan mereka yang lebih kaya. Hal ini terjadi karena masyarakat miskin memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan publik secara legal dan sering kali dihadapkan pada sistem birokrasi yang berbelit-belit serta pejabat yang korup. Mereka juga kurang memiliki kekuatan untuk menolak atau melaporkan tindakan korupsi karena takut akan konsekuensi negatif, seperti kehilangan akses ke layanan yang mereka butuhkan. Kemiskinan tidak hanya meningkatkan kerentanan terhadap korupsi tetapi juga memperkuat budaya korupsi dalam masyarakat yang kurang sejahtera (Hunt & Laszlo, 2012).

Kemiskinan merupakan akibat dari banyaknya pengangguran dan tidak meratanya distribusi pendapatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlando (2016) serta Ata dan Arvas (2011) yang menemukan pengangguran dan tidak meratanya distribusi pendapatan memengaruhi secara signifikan terhadap peningkatan korupsi.

KESIMPULAN

Hasil temuan dan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap CPI. Negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi cenderung memiliki sumber daya yang memadai dalam memberantas korupsi. Selanjutnya, penerimaan sektor pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap CPI. Kenaikan penerimaan perpajakan membuka peluang yang lebih besar bagi pejabat untuk menyalahgunakan dana publik. Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap CPI. Selanjutnya, kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap CPI. Masyarakat miskin terpaksa memberikan suap kepada pejabat publik yang korup untuk mendapatkan askes layanan public. Selanjutnya, semua variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak, Indeks Pembangunan Manusia, dan kemiskinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Corruption Perceptions Index* di Indonesia periode 1999-2022.

Penerimaan sektor pajak merupakan variabel yang paling signifikan dalam mempengaruhi CPI di Indonesia maka perlu dilakukan upaya perbaikan sistem perpajakan sehingga korupsi dapat secara efektif diturunkan.

REFERENSI

Adriyanto, Ageng Rian. (2016). Analisis Determinan Korupsi di Indonesia Tahun 2006-2015. (Undergraduate Thesis, Universitas Gajah Mada).

Aidt, T. S. (2003). Economic Analysis of Corruption: A Survey. *The Economic Journal*, Vol.113, No.491, November: 632-652.

Akbar, Mohammad Reza Hafiz. (2013). Analisis Determinan Ekonomi Korupsi Di Era Desentralisasi Pada 12 Ibukota Provinsi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*

Aspinall, E., & Van Klinken, G. (2011). *The State and Illegality in Indonesia*. Leiden: KITLV Press.

Ata, A. Y., & Arvas, M. A. (2011). Determinants of Economic Corruption: A Cross-Country Data Analysis. *International Journal of Business and Social Science*, *2*(13), 161-169.

Badan Pusat Statistik. (2023). Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 1999-2022. Badan Pusat Statistik.

_____ (2023). Kemiskinan di Indonesia Tahun 1999-2022. Badan Pusat Statistik.

_____ (2023). Pendapatan Negara Sektor Pajak di Indonesia Tahun 1999-2022. Badan Pusat Statistik.

_____ (2023). Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1999-2022. Badan Pusat Statistik.

Barreto, R. A. (2000). *Endogenous Corruption in A Neoclassical Growth Model. European Economic Review*, *44*(1), 35-60.

Bertinelli, L., Bourgain, A., Dan Léon, F. (2020). *Corruption and Tax Compliance: Evidence from Small Retailers In Bamako, Mali*. *Applied Economics Letters*, *27*(5), 366-370.

Campos, J. E., Lien, D., & Pradhan, S. (2010)**.** The impact of corruption on growth and public spending. *Economic Policy, 25*(3), 433-455. https://doi.org/10.1093/epolic/eiq013

Elbahnasawy, N. G., dan Revier, C. F. (2012). The Determinants of Corruption: Cross-Country-Panel-Data Analysis. *The Developing Economies, 50(4), 311–333.* doi:10.1111/j.1746-1049.2012.00177.x

Erlando, A. (2016). Analisis Determinasi Faktor Ekonomi Terhadap Korupsi di Beberapa Kota Indonesia (Undergraduate Thesis, Universitas Gadjah Mada).

Fismann, R., dan R. Gatti. 2002. Decentralization and corruption: Evidence across countries. *Journal of Public Economics* 83:325-345.

Franciari, P. S., dan Sugiyanto, F. X. (2012). Analisis Hubungan IPM, Kapasitas Fiskal, dan Korupsi terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008 dan 2010) (Undergraduate Thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

Gujarati, Damodar dan Dawn C. Porter. (2012). Dasar-Dasar Ekonometrika (Buku2). (Terj.) Raden Carlos Mangunson. Jakarta: Salemba Empat.

Hunt, J., & Laszlo, S. (2012). Is bribery really regressive? Bribery's costs, benefits, and mechanisms. *World Development, 40*(2), 355-372. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.06.001

Justesen, M.K., & Bjørnskov, C. (2014*).* Exploiting The Poor: Bureaucratic Corruption and Poverty In Africa. *World Development*, 58, 106-115. doi:10.1016/j.worlddev.2014.01.002.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Jumlah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Tahun 2004-2022. KPK.

Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *Quarterly Journal of Economics, 110*(3), 681-712. https://doi.org/10.2307/2946696

Myrdal, G. 1968. *Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations*. Pantheon, New York.

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1993). Corruption. *The Quarterly Journal of Economics*, *108*(3), 599-617. https://doi.org/10.2307/2118402

Silaen, Friska Y., & Sasana, H. (2013). Analisis Determinan Korupsi Di Era Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Economics*, *2*(1), 227-232.

Transparency International (2022). *Corruption Perception Index in The World.* International Transparency.

Treisman, D. (2000). The causes of corruption: a cross-national study. *Journal of Public Economics, 76*(3), 399–457. https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00092-4

Tyburski, M., Egan, P., dan Schneider, A. (2020). *Deep Determinants of Corruption? A Subnational Analysis of Resource Curse Dynamics in American States*. *Political Research Quarterly*, *73*(1), 111-125.

Uroos, A., Shabbir, M. S., Zahid, M. U., Yahya, G., & Abbasi, B. A. (2022). *Economic Analysis of Corruption: Evidence From Pakistan. Transnational Corporations Review*, *14*(1), 46-61.

Verawaty, V. (2019). Pengaruh BPK, Karakteristik Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *MBIA*, *18*(2), 79-99.